



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN  
**SUB UNIT KERJA** : WAKIL KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PANDJI TIRTAYASA
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 59531

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.065.000.000

1. Tanah Seluas 1500 m<sup>2</sup> di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m<sup>2</sup>/150 m<sup>2</sup> di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 8000 m<sup>2</sup> di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1600 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
6. Tanah Seluas 700 m<sup>2</sup> di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. ----

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 37.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 267.811.763

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.369.811.763

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 5.369.811.763

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkn.kpk.go.id](http://elhkn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.